



Jurnal Ilmiah Aset
Vol. 27 No. 1
Maret 2025
p-ISSN 1693-928X
e-ISSN 2685-9629

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Herbangun Giri Saputro
Elma Muncar Aditya
lin Indarti

Program Studi Akuntansi STIE Widya Manggala
Jl. Sriwijaya No 32 Semarang
Email: dityaditya@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the influence of human resource competence and the influence of the regional financial accounting system (SAKD) on the quality of regional government financial reports at the Genuk District Office, Semarang. This study uses a comparative causal research design using survey methodology. The data in this study are quantitative, consisting of numeric values. The sample used in this study were 42 employees of the finance department at the Genuk District Office, Semarang. The results of data processing using SPSS 26 can be concluded that it was found that human resource competence has a significant positive effect on the quality of regional financial reports in Genuk District, Semarang City, the application of the regional financial accounting system does not affect the quality of regional financial reports in Genuk District, Semarang City, and human resource competence and the application of the regional financial accounting system simultaneously have a significant effect on the quality of regional financial reports.*

hal. 39-47
DOI: 10.37470/1.27.1.250

Diterima : 21 Januari 2025
Disetujui : 4 Februari 2025

Keywords : *Human Resource Competence, Regional Financial Accounting System, Quality of Financial Reports*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi dan mencakup informasi keuangan yang dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik pihak internal maupun eksternal (Biduri, 2018a). Laporan keuangan merupakan puncak dari prosedur akuntansi yang telah dijalankan. Mirip dengan sektor komersial, sektor publik wajib menghasilkan laporan keuangan formal, antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Lebih Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan harus memenuhi kualitas kualitatif yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman (Nasution, 2006).

Pemerintah wajib menghasilkan laporan keuangan untuk keperluan pengendalian, penilaian kinerja, akuntabilitas, dan menginformasikan proses pengambilan keputusan (Jultri & Made, 2021a). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas agar dapat memudahkan pemahaman informasi yang ada di dalamnya oleh para pemangku kepentingan yang merupakan penerima laporan tersebut. Potensi dampak dari laporan keuangan pemerintah yang kurang baik antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan keuangan negara dan potensi menurunnya kualitas pengambilan keputusan.

Banyak kasus dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang datanya tidak disajikan sesuai ketentuan sehingga menimbulkan penyim-

pangan. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan menjunjung akuntabilitas publik semakin meningkat. Salah satu pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah pembuatan laporan keuangan secara periodik sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas (Wati et al., 2014). Istilah "periodik" mengacu pada sesuatu yang terjadi atau berulang secara berkala. Untuk memenuhi harapan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat menjamin tersedianya informasi yang berkualitas.

Arti penting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terletak pada kontribusinya terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemanfaatan pelaporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam perumusan program pemerintah di masa depan. Penggunaan laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan berpotensi mendorong kemajuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penilaian terhadap laporan keuangan dapat diketahui melalui evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penilaian atas laporan keuangan dilakukan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga menghasilkan penelaahan yang berlapis-lapis (Lathif et al., 2020a). Temuan pemeriksaan tersebut merupakan penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan tingkat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Disusul Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP). Selain dari sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan, penilaian terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dapat didasarkan pada ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan daerah, tidak adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bidang informasi keuangan, dan penyajian tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas Laporan Keuangan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditentukan oleh serangkaian kriteria dan unsur (Andayani, 2007). Kriteria ini, yang merupakan bagian dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, mencakup relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, total 10,198 temuan telah diidentifikasi, mencakup

15,568 kekhawatiran berbeda. Sebagian besar, khususnya 51 persen, dari permasalahan yang teridentifikasi disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Bukti tersebut menunjukkan adanya kejanggalan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan pada seluruh proses pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan temuan Nasution (2006) dalam Pasal 33

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menunda alokasi dana Umum. Dana Alokasi (DAU) dalam hal Pemerintah Daerah tidak memberikan laporan mengenai sistem keuangan daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skenario ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum memenuhi standar keandalan dan relevansi, yang merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan bagi berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, tantangan mungkin timbul ketika mencoba membuat perbandingan antar periode waktu yang berbeda.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah kriteria-kriteria yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat tercapai suatu tujuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Kualitas Laporan Keuangan dapat diukur dengan indikator a) Relevan, b) Andal, c) dapat dipahami, dan d) dapat dibandingkan. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang diminta menjawab dalam skala likert menggunakan 11 pernyataan. Empat ukuran kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, merupakan syarat penting yang harus dimiliki laporan keuangan agar dapat mencapai tingkat kualitas yang sesuai Laporan keuangan dapat dikatakan relevan ketika informasi dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta dapat mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi dalam laporan keuangan tahunan bebas dari pengetahuan yang menyesatkan atau kesalahan material, benar dalam segala hal dan dapat diverifikasi. Informasi tersebut mungkin relevan, tetapi penggunaannya dapat menyesatkan jika sifat atau representasinya tidak dapat diandalkan. Informasi yang ada dapat

dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya ataupun dengan entitas laporan keuangan yang lain pada umumnya. Informasi yang telah tersaji dalam laporan keuangan dapat memberikan pemahaman yang mudah oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan tenaga terampil yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai peraturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Sasmita (2020), kompetensi SDM mengacu pada kapasitas untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Kehadiran sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Adanya kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor fundamental yang memungkinkan individu mencapai kinerja luar biasa dalam upaya profesionalnya. Selain itu, hal ini memainkan peran penting dalam proses strategis perencanaan, implementasi, dan pengaturan di dalam organisasi terkait (Abdullah, 2004). Faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia antara lain adalah pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman kerja. Selain memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, pelaporan keuangan daerah juga harus memperhatikan integrasi sistem akuntansi pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan semua entitas pelapor, termasuk pemerintah daerah, mengungkapkan upaya mereka yang sistematis dan terstruktur, serta hasil yang dicapai, selama periode pelaporan tertentu. Agar laporan keuangan memiliki informasi substantif, laporan keuangan harus dirumuskan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan. Namun demikian, efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih terbatas. Menurut Pujanira (2017), penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual menghadapi beberapa tantangan yang diidentifikasi oleh BPK.

Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibanding elemen lain selain modal, teknologi, dan uang, sebab manusia yang akan mengendalikan sumber daya lain. Kompetensi sumber daya manusia adalah pengetahuan dan keahlian untuk menyelesaikan tugastugas dalam organisasi. Untuk mematuhi Standar Akuntansi berbasis akrual, penyusunan laporan keuangan memerlukan penggunaan sistem akuntansi.

Perlunya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah agar dapat mengelola informasi akuntansi secara efektif. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai kemampuan menyediakan keluaran data dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Irafah (2020a), sistem akuntansi memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana informasi akuntansi diproses, dimulai dari saat data ditangkap dalam dokumen dan berlanjut hingga laporan dihasilkan. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Menurut Permadi (2013) indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mencakup a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, b) prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar akuntansi berlaku umum, c) pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara periodik. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tingkat relevansi yang terkait dengan variabel atribut individual yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan (Ihsanti, 2014; Irafah et al., 2020a; Pujanira & Taman, 2017). Namun, masih sedikit penelitian yang dilakukan di Indonesia yang secara spesifik meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah. Kurangnya investigasi ilmiah dan kesenjangan dalam temuan penelitian memberikan peluang menarik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Selain hal-hal tersebut di atas, penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi aspek lain yang berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Khususnya di tingkat kantor kecamatan.

Salah satu kantor wilayah yang mengungkapkan informasi keuangannya adalah Kantor Kecamatan Genuk yang berlokasi di Semarang. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Genuk dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan. Tujuannya adalah untuk mengawasi pengalokasian dan penggunaan uang APBD, serta menyusun dan menganalisis rencana dan laporan anggaran untuk periode berjalan. Sebagai gambaran, alokasi dana untuk pengadaan komoditas, pemeliharaan jalan di wilayah Genuk, dan perbaikan rumah dinas kecamatan dapat dicontohkan. Kecamatan Genuk mencakup total 13 desa atau kelurahan, yaitu Sembungharjo, Karangroto, Trimulyo, Gebangsari, Terboyo Kulon, Banjardowo, Bangetayu Kulon,

Genuksari, Kudu, Bangetayu Wetan, Muktiharjo, Terboyo Wetan, dan Penggaron Lor.

Kantor Kecamatan Genuk di Semarang dipilih sebagai konsekuensi dari penilaian yang dilakukan di Kota Semarang yang secara konsisten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya selama tujuh periode berturut-turut. Predikat WTP dapat diartikan bahwa pemerintah telah secara efektif melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan dedikasinya terhadap penerapan kerangka tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (*good governance*). Hal ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Kecamatan Genuk dianggap sebagai salah satu kecamatan terluas di wilayah Semarang yang mencakup total 13 kecamatan dengan luas wilayah sekitar 27 km persegi dibawah Kecamatan Gunungpat, Mijen, Tembalang, dan Banyumanik. Dibandingkan dengan kecamatan besar lain, Kecamatan Genuk memiliki kawasan industri besar yaitu kawasan industri Terboyo yang masih terus berkembang dan berdampak pada perekonomian warga Kota Semarang. Namun opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan terhadap laporan keuangan kota Semarang belum bebas dari kesalahan dan kelemahan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai bagian keuangan kantor kecamatan Genuk, Kota Semarang, kelemahan yang terjadi yaitu terlambatnya pelaporan keuangan dikarenakan kesalahan output hasil sistem pelaporan keuangan yang ada. Kesalahan tersebut sering kali disebabkan oleh ketidakcocokan antara data yang diinput dan format yang diterima oleh sistem, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk memperbaiki dan menyesuaikan laporan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai terhadap penggunaan sistem informasi keuangan menjadi faktor penghambat utama, di mana pegawai kesulitan dalam memproses data secara efisien. Kondisi ini juga diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras yang kurang memadai dan seringnya terjadi gangguan jaringan, yang semakin menunda penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.

TINJAUAN TEORETIS

Stewardship Theory

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* sebagai pendukung dalam analisis. Menurut

Donaldson dan Davis (1991), *Stewardship Theory* menyatakan bahwa manajer sebagai steward memiliki tujuan utama untuk mencapai keberhasilan organisasi, dan mereka merasa bahwa kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan pemegang saham. *Stewardship Theory* mengasumsikan bahwa manajer cenderung lebih puas secara psikologis ketika mereka berhasil mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik, karena hal itu memberikan penghargaan dan prestasi pribadi. Dalam kajiannya, Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) menjelaskan bahwa *Stewardship Theory* berfokus pada hubungan kepercayaan dan pencapaian tujuan kolektif. Manajer bertindak sebagai steward yang lebih memperhatikan tujuan jangka panjang organisasi, termasuk keberlanjutan dan kesejahteraan pemegang saham, daripada keuntungan pribadi jangka pendek. Mereka berargumen bahwa steward akan lebih mungkin untuk bekerja keras dan lebih terlibat dalam pencapaian organisasi, karena mereka memiliki ikatan yang kuat dengan keberhasilan organisasi itu sendiri.

Pemerintah Daerah

Menurut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan bantuan. Artinya, pemerintahan daerah mempunyai tingkat kemandirian yang setinggi-tingginya dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pemerintahan daerah terdiri atas Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kerangka hukum tersebut mengatur hubungan hierarki antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta interaksi antar provinsi, kabupaten, dan kota. Kerangka ini mempertimbangkan karakteristik unik dan keragaman masing-masing daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan dan menegakkan peraturan yang adil dan harmonis mengenai hubungan keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Wignjohartojo, 2001).

Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibanding elemen lain selain

modal, teknologi, dan uang, sebab manusia yang akan mengendalikan sumber daya lain. Kompetensi sumber daya manusia adalah pengetahuan dan keahlian untuk menyelesaikan tugastugas dalam organisasi. Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan 3 indikator yaitu, a) Pengetahuan, b) Keterampilan, dan c) Sikap.

Tumbuhnya keinginan terhadap pemerintahan daerah sejalan dengan prinsip otonomi pemerintahan daerah. Pemerintah harus mempunyai kapasitas untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik secara efektif. Salah satu tugas tata kelola yang efektif adalah memberikan informasi kepada penyedia keuangan dan pengguna lainnya. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, persiapannya memerlukan kehadiran sumber daya manusia. Keterlibatan sumber daya manusia dalam proses pelaporan informasi keuangan akan dilakukan secara komprehensif, sehingga menjamin dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dari awal hingga akhir. Hasil Penelitian Irafah et al (2020b) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian Aprisyah & Yuliati (2021) yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

(Permendagri No. 59 Tahun 2007). Menurut Angga Dwi Permadi (2013) indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mencakup a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, b) prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar akuntansi berlaku umum, c) pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara periodik.

Pemerintah bertujuan untuk menjamin proses akuntansi dilaksanakan secara akurat, mengikuti prosedur sistematis sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berpegang pada prinsip dan standar yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas laporan keuangan dapat dianggap memuaskan jika informasi yang diberikan relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

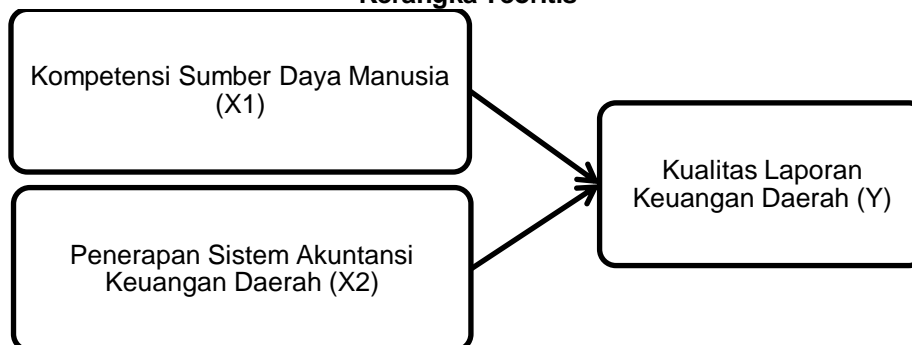
Penelitian Jultri et al. (2021b) dan Lathif et al. (2020b) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Rahman & Permatasari (2021) juga berpendapat bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal komparatif dengan menggunakan metodologi survei. Penelitian kausal komparatif melibatkan studi hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih yang memiliki ciri-ciri permasalahan.

Gambar 1
Kerangka Teoritis



Data primer dalam penelitian ini terdiri dari tanggapan partisipan yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan pegawai bagian keuangan pada Kantor Kecamatan Genuk, Semarang sebanyak 42 orang.

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji instrument. Selanjutnya, uji regresi linier berganda dilakukan setelah model penelitian telah diuji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan pengujian validitas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X dan Y (kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah) lebih kecil dari nilai signifikansi, yaitu dibawah 0,05. Dapat disimpulkan semua item pernyataan variabel independen dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian.

Pengujian reliabilitas ini dilakukan pada setiap butir pernyataan variabel yang valid. Suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari variabel X dan Y (kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah) lebih besar dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan variabel reliable yang berarti bahwa kuisisioner sudah dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengolahan data diperoleh nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,200 dan nilai signifikan pada 0,095. Nilai Kolmogrov-Smirnov dan nilai signifikan 0,200 $> 0,05$ menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Hasil pengolahan untuk heterokedastisitas menunjukkan nilai signifikansi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,998 lebih besar dari 0,05 (0,998 $> 0,05$), dan nilai signifikansi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,625 lebih besar dari 0,05 (0,625 $> 0,05$) Sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil pengolahan data untuk multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel bebas lebih kecil dari 10 yaitu nilai

tolerance adalah 0,987 $> 0,10$ dan nilai VIF penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan nilai di atas dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Determinasi

Berdasarkan tabel 1, hasil koefisien determinasi (R^2) nilai adjusted R square sebesar 0,264 maka dapat diartikan bahwa 26,4% variasi kualitas laporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sisanya sebesar 73,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti *New Public Management* dan Peran Internal Audit.

Hasil Uji Regresi

Berdasarkan tabel 2 diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 13.759 + 0.197 X_1 - 0.010 X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diketahui bahwa:

- Nilai Konstanta a adalah 13.759. Koefisien konstanta yang bernilai positif maka artinya jika kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bernilai 0, maka kualitas laporan keuangan daerah nilainya 13.759.
- Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (X_1) adalah 0.197. Koefisien positif maka artinya terjadi hubungan positif antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah. Apabila variabel lain nilainya tetap dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mengalami peningkatan 1% maka kualitas laporan keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 0.197.
- Koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) adalah 0.010. Koefisien negatif maka artinya terjadi hubungan negatif antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah. Apabila variabel lain nilainya tetap dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mengalami peningkatan 1% maka kualitas laporan keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 0.010

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji t dapat dilihat pada hasil uji regresi pada tabel 3. Hasilnya menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

- Kompetensi sumber daya manusia, nilai t dari Kompetensi sumber daya manusia adalah 4,044 lebih besar dari nilai t tabel sebesar

2,0210 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

- Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, nilai t dari Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,110 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,0210 dan nilai signifikansi $0,913 > 0,05$, maka H_a ditolak H_0 diterima atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena sumber daya manusia merupakan komponen utama yang mengoperasikan sistem, melakukan pencatatan, dan memastikan pelaporan keuangan dilakukan dengan benar. Kebijakan SDM yang tepat dapat memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan pengelola yang

kompeten di bidang akuntansi dan keuangan. Tanpa keterampilan yang memadai, pegawai tidak akan mampu memahami atau menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan benar, yang berisiko menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat (Irafah, 2020).

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil Penelitian Irafah et al (2020b) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahman & Permatasari (2020) yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas laporan keuangan daerah (Y)

Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Terdapat beberapa alasan mengapa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, meskipun secara teori seharusnya sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan. Meskipun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah diterapkan, kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada kemampuan dan kompetensi pengguna sistem, yaitu staf pemerintah daerah (Ihsanti, 2014). Jika sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam hal akuntansi atau teknologi informasi, sistem

Tabel 1
Hasil Uji Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.547	.300	.264	6.33143

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.759	8.522		1.615	.114
	X1	.197	.049	.545	4.044	.000
	X2	-.010	.088	-.015	-.110	.913

Sumber: Data diolah, 2024

yang baik tidak akan berfungsi secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pelaporan yang tidak akurat, atau bahkan penyalahgunaan sistem.

Penerapan SAKD harus didukung oleh kepatuhan yang tinggi terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, di beberapa daerah, kepatuhan terhadap regulasi keuangan masih rendah. Jika manajemen keuangan daerah tidak mematuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan atau jika terjadi praktik-praktik yang tidak transparan, maka penerapan sistem akuntansi, sebaik apapun, tidak akan secara otomatis meningkatkan kualitas laporan keuangan (Irafah et al., 2020). Meskipun SAKD diterapkan, tanpa adanya pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang jelas, sistem tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan dari otoritas pengawas internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan aturan. Jika pengawasan lemah, kesalahan atau penyalahgunaan sistem dapat terjadi tanpa ada tindakan korektif. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Penelitian Jultri et al. (2021b) dan Lathif et al. (2020b) yang menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

SIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu Mengefektifkan sistem akuntansi keuangan daerah memerlukan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan integrasi data, sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan

dengan lebih cepat dan akurat. Langkah ini harus diiringi dengan pembaruan standar operasional yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan akuntansi pemerintah yang berlaku. Selain itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntansi pemerintah melalui pelatihan dan sertifikasi akan memastikan pemahaman yang mendalam atas prosedur akuntansi dan penggunaan teknologi. Hasilnya, laporan keuangan daerah dapat dihasilkan dengan kualitas yang lebih tinggi, transparan, dan kredibel untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.

Penelitian selanjutnya hendaknya meneliti variabel lain yang dapat menyebabkan Kualitas LKPD lebih berkualitas atau tidak berkualitas agar dapat menjadi rujukan dan pembandingan antar variabel yang dapat mempengaruhi Kualitas LKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2004). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. *Kinerja*, 8(2), 209–210.
- Andayani, W. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Antonius, R., & Tampubolon, L. D. R. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 39–52.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1–52.
- Biduri, S. (2018a). *Akuntansi sektor publik*. Umsida Press, 1–197.
- Biduri, S. (2018b). *Akuntansi sektor public*. Umsida Press, 1–197.
- Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2023). *Effective training: Systems, strategies, and practices*. SAGE Publications.
- Cornforth, C. (2004). The governance of cooperatives and mutual associations: A paradox perspective. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 75(1), 11–32.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fadhil, M. (2016). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada balai latihan kerja industri Makassar. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 1(1), 70–81.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).

- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020a). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020b). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348.
- Jultri, A., & Made, A. (2021a). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1).
- Jultri, A., & Made, A. (2021b). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1).
- Lathif, A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020a). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(06).
- Lathif, A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020b). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(06).
- Manurung, H., & Anggraeni, E. V. (2023). AKUNTANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 10–20.
- Nasution, D. A. D. (2006). Akuntansi sektor publik. *Nurdin, M., & Milka, I. (2021). Analisis Nilai Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 4(1), 31–38.
- Pasaribu, F., & Tufty, Z. (2021). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri 15 Medan. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(2), 258–272.
- Permadi, A. D. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 14–28.
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh kompetensi sdm dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries. *World Bank Staff Working Paper*, 581, 13–28.
- Sasmita, D. A., Nasrizal, N., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 118–129.
- Van Slyke, D. M. (2007). Agents or stewards: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(2), 157–187.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., Ak, S. E., & SINARWATI, N. I. K. (2014). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Wignjohartojo, P. (2001). Good Corporate Governance. *Majalah Ekonomi, Tahun XINQ*, 1, 64–77.